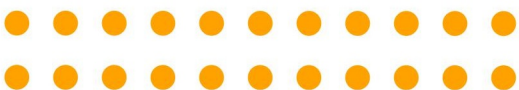


Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



Laporan Kinerja Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2022



DAFTAR ISI

	Hal
Cover	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	1
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	3
A. Target Kinerja Tahun 2020 - 2024	3
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	5
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	5
B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022	7
C. Capaian Kinerja Lainnya	7
BAB 4 PENUTUP	9
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022	9
B. Rencana Tindak Tahun 2023	9
DOKUMENTASI KEGIATAN	

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kelompok Substansi Kepegawaian Tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan target-target yang harus dicapai yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022, Kepala Bagian Umum Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan *cascading* dan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk seluruh Subkoordinator.

Laporan Kinerja Kelompok Substansi Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022.

Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kelompok Substansi Kepegawaian Tahun 2022 ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi Kepala Bagian Umum dan Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat serta mitra kerja dalam upaya evaluasi kinerja dan menetapkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun mendatang.

Plt. Subkoordinator Kepegawaian,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rahman

BAB I

PENDAHULUAN

Kelompok Substansi Kepegawaian yang berada di bawah Bagian Umum merupakan *enabler* bagi tugas dan fungsi utama pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Bidang Pengawasan dan Sub Bagian lingkup Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Laporan Kinerja (LKj) Kelompok Substansi Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kelompok Substansi Kepegawaian berada di bawah Bagian Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, serta komunikasi dan informasi.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2021, struktur organisasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum masih dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Namun dengan telah ditetapkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, struktur organisasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipecah menjadi 2 (dua) dan mengalami perubahan nomenklatur yaitu:

1. Sub Bagian Kepegawaian **menjadi** Kelompok Substansi Kepegawaian.
2. Sub Bagian Umum **menjadi** Kelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga dan Kearsipan.

Dengan adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi yang baru berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan belum adanya pejabat

Subkoordinator Kepegawaian yang definitf maka pada tanggal 10 Januari 2022, Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga dan Kearsipan yang dijabat oleh Rahman, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Subkoordinator Kepegawaian sesuai Surat Perintah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PRIN-34/PW27/1/2022 tanggal 10 November 2022.

Plt. Subkoordinator Kepegawaian dibantu oleh 2 orang staf PNS, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
A	PNS/ASN	
1.	Hendri Cahyono	Pengelola Kepegawaian
2.	Septio Hari Nugroho	Pengelola Kepegawaian

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diformulasikan dalam visi BPKP, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *TrustedAdvisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *GoodGovernance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020–2024

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran dari program strategis sesuai visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Visi dan misi serta tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Program untuk menunjang kegiatan tersebut terdiri dari program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan program dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan tahun 2020 – 2024 terdiri dari 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (*enabler*). Rincian dapat dilihat pada Lampiran.

Dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja kegiatan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2000– 2024 yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Bagian Umum terdiri dari satu

sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (*enabler*). Indikator kinerja Bagian Umum yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Kelompok Substansi Kepegawaian dalam upaya untuk mencapai target kinerja meski tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama yaitu tercapainya Nilai Skor Zona Integritas unit Kerja dan Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja.

No	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	TargetKinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja							
1.	Nilai Skor Zona Integritas unit Kerja	Nilai Skala 100	75	76	77	78	79
2.	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	73	76	80	81

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (*enabler*) dalam Perjanjian Kinerja Bagian Umum Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022, Kelompok Substansi Kepegawaian berperan dalam mendukung pencapaian target atas 2 indikator kinerja Bagian Umum yaitu :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja *)	% (Persen)	70

*) Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2021 dan belum termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi dari pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Bagian Umum.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja Bagian Umum Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran penting Kelompok Substansi Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja **melampaui target** yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	90,60	120,80
	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja	% (Persen)	70	100	142,86

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Indikator Kinerja nilai skor Zona Integritas diukur dengan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2022, realisasi nilai skor Zona Integritas adalah sebesar 90,60 atau mencapai 120,80% dari target sebesar 75. Nilai skor Zona Integritas ini diperoleh atas hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada tahun 2022.

Realisasi kinerja skor Zona Integritas tahun 2022 sebesar 90,60 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 87,17 mengalami kenaikan sebesar 3,43 atau 3,93%.

Nilai skor Zona Integritas tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 118% terhadap target skor 77.

Perbedaan capaian realisasi kinerja terhadap target Perkin Tahun 2022 dengan target 2022 pada Renstra 2020-2024 dikarenakan adanya revisi Perkin di tahun berjalan yang belum disesuaikan dengan target pada Renstra 2020-2024. Capaian kinerja yang cukup tinggi ini didukung antara lain oleh:

- a. Telah membentuk Tim untuk pelaksanaan zona integritas;
- b. Terdapat media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM;
- c. Pimpinan berperan sebagai *role model* pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM;
- d. SDM menggunakan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional;
- e. Penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan berdasarkan formasi jabatan;
- f. Rotasi pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan pengembangan karier pegawai;
- g. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan mengupayakan pemenuhan syarat-syarat yang menjadi perhatian dalam pembangunan Zona Integritas, terutama yang belum mencapai nilai ambang batas minimum menurut hasil penilaian mandiri.

2. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja

Indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja) diukur dari jumlah pengendalian intern yang berhasil menurunkan risiko ke bawah selera risiko dibandingkan dengan jumlah seluruh pengendalian intern yang ada.

Pada tahun 2022, efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja) terealisasi sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.

Pada tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 (empat) risiko. Atas risiko-risiko tersebut telah dilakukan 6 (enam) tindak pengendalian intern yang seluruhnya berhasil menurunkan nilai risiko (*treatedrisk*) hingga ke bawah selera risiko.

Realisasi kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja) tahun 2022 yaitu 100, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai 87,50 mengalami kenaikan sebesar 12,50 atau 14,29%.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2021 dan belum termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maupun target Renstra Tahun 2020 – 2024.

Capaian indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan dengan berbagai upaya penting antara lain:

- a. Monitoring atas setiap pengendalian yang dibangun.
- b. Pendokumentasian setiap langkah pengendalian yang telah dilaksanakan sebagai dasar penilaian SPIP.
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait Manajemen Risiko (MR).

Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun 2023 yaitu:

- a. Melakukan FGD untuk mengidentifikasi akar masalah dan risiko strategis yang dapat menghambat pencapaian target kinerja organisasi, selanjutnya menentukan langkah pengendalian yang efektif untuk mendukung capaian tujuan yang lebih optimal.
- b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya SPIP serta keterlibatan secara aktif seluruh komponen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi sehingga tercipta sinergi yang baik antar komponen organisasi.

B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang dikelola oleh Kelompok Substansi Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 yaitu sebesar Rp70.384.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp70.384.000,00 atau 100%.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2022, beberapa kegiatan pelayanan rutin maupun kegiatan yang bersifat insidental yang dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Kepegawaian, yaitu:

1. Mengadministrasikan berkas kepegawaian seluruh pegawai lingkup Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

2. Menindaklanjuti dan memproses surat masuk dan surat keluar yang terkait dengan urusan kepegawaian.
3. Menyusun rekapitulasi daftar hadir pegawai secara rutin setiap bulan.
4. Memproses daftar tunjangan keluarga (KP4) pegawai.
5. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
6. Menyusun Bezetting pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
7. Mengelola dan mengadministrasikan surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) dan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
8. Melakukan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) pegawai.
9. Mempersiapkan usulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala pegawai
10. Mengelola administrasi cuti pegawai (cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti besar).
11. Membuat surat pengantar dan mempersiapkan berkas untuk penerbitan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu).
12. Membuat surat pengantar dan mempersiapkan berkas untuk pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg).
13. Mengelola pemindahan, pemberhentian, mutasi pegawai.
14. Penyusunan jadwal petugas Apel Pagi yang dilaksanakan secara rutin setiap hari senin;
15. Penandatanganan Pakta Integritas pegawai
16. Penyusunan laporan GDN bulanan,
17. Pengurusan administrasi pelantikan pegawai,
18. Monitoring proses penilaian angka kredit melalui SIBIJAK,
19. Pengurusan administrasi pensiun pegawai.
20. pemutakhiran data mandiri pegawai,
21. pengusulan satya lencana bagi pegawai yang memenuhi syarat,
22. membuat surat tugas/izin belajar,
23. Pemrosesan sanksi/hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai,
24. memproses usulan peserta diklat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kelompok Substansi Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban/akuntabilitas kinerja atas dukungan terhadap pencapaian target sasaran kegiatan Bagian Umum tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 ini merupakan pelaporan kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat periode 2020-2024.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Terdapat dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi target kinerja Bagian Umum Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 yaitu Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja dan Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja, telah mencapai kinerja diatas 100%, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 131,83%.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Adapun upaya yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Kepegawaian untuk menunjang pencapaian target kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan monitoring terhadap pemenuhan lakukan koordinasi dengan PPK dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Tim Teknis dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Papua Barat serta Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa BPKP, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan pengadaan peralatan dan mesin kantor melalui proses pemilihan penyedia secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil Kelompok Substansi Kepegawaian untuk menunjang pelayanan kepada mitra kerja, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kegiatan diklat;

Upacara dan Pelantikan



Pengukuhan Kepala Perwakilan

